



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 910/Kep.91-Bappelitbangda/II/2021**

TENTANG

**PENETAPAN RINCIAN SUB KEGIATAN BERSUMBER DARI DANA
INSENTIF DAERAH TAHUN 2021 DAN PENGGUNAAN SILPA DANA
INSENTIF DAERAH TAHUN 2019**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa penyesuaian alokasi Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2020 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, perlu dirinci kegiatan-kegiatan yang pendanaannya bersumber Dari Dana Insentif Daerah (DID);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka rincian sub kegiatan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1237);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 16 Seri A);
13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 94 Seri A).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat tanggal 8 Februari 2021 Nomor 910 /06.a-BA.TAPD/ Bappelitbangda.AP4EP tentang pembahasan jenis-jenis kegiatan dan uraian belanja yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

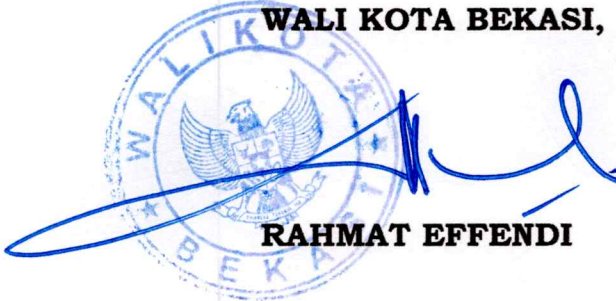
KESATU : Rincian kegiatan bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2021 dan Penggunaan SILPA Dana Insentif Daerah Tahun 2019.

KEDUA : Rincian kegiatan bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2021 dan Penggunaan SILPA Dana Insentif Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 25 Februari 2021

WALI KOTA BEKASI,

The image shows the official seal of the Mayor of Bekasi, which is circular and contains the Garuda Pancasila emblem. Overlaid on the seal is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name RAHMAT EFFENDI is printed in bold black capital letters.

RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Bekasi.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR : 910/Kep.91-Bappelitbangda/II/2021
 TENTANG : PENETAPAN RINCIAN SUB KEGIATAN DARI DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
 DAN PENGGUNAAN SILPA DANA INSENTIF DAERAH TAHUN 2019

PENETAPAN RINCIAN SUB KEGIATAN BERSUMBER DANA DID TA 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	USULAN		TARGET	PAGU (RP.)
		KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
A.	Kelompok Kategori Pemulihan Ekonomi				
1	Dinas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster kompetensi	Pelatihan Kompetensi	500,000,000
2	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Penyediaan 300 domba untuk 30 kelompok	7,500,000,000
3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Pemberdayaan 10 kelompok pembudidaya magot dengan memberikan bibit magot dan sarana prasarananya	600,000,000
			Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	UMKM Kuliner gabus pucung	1,434,575,000

NO	PERANGKAT DAERAH	USULAN		TARGET	PAGU (RP.)
		KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Promosi Produk UMKM online	600,000,000
		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Facilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Melaksanakan Penyuluhan terkait Pembentukan Koperasi	200,000,000
4	DPMPTSP	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Facilitasi Pelayanan Perizinan untuk UMKM	1,000,000,000
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Promosi Investasi	500,000,000
	TOTAL				12,334,575,000
	JUMLAH SUB KEGIATAN				8

NO	PERANGKAT DAERAH	USULAN		TARGET	PAGU (RP.)
		KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
B.	Kelompok Kategori Pendidikan				
1	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Pembangunan USB SMP Negeri 45 Kota Bekasi Pembangunan USB SMP Negeri 47 Kota Bekasi Pembangunan USB SMP Negeri 48 Kota Bekasi	10,242,034,192
2	SETDA	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pengelolaan Data Dapodik dan Pengembangan EnSys Pada Sekolah Negeri/Swasta di Kota Bekasi	1,500,000,000
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Bantuan Biaya Semester Mahasiswa	3,000,000,000
	TOTAL				14,742,034,192
	JUMLAH SUB KEGIATAN				3
C. Kelompok Kategori Kesehatan					
1	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Perumahan	Kegiatan ini memberikan bantuan makanan untuk yayasan yang menaungi PMKS, dari jumlah 270 Yayasan yang ada di Kota Bekasi baru 30 yayasan yang dialokasikan dari APBD	300,000,000

NO	PERANGKAT DAERAH	USULAN		TARGET	PAGU (Rp.)
		KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cetak Kartu Penerima BLT	200,000,000
2	Rumah Sakit Umum Daerah	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan alat Kedokteran dan Keperawatan untuk kelengkapan UGD berupa Hefa Filter 23 unit, Pulse Oxymetri 96 unit dan Gun Thermometer 10 unit	1,790,937,550
				Pengadaan Phantom sebanyak 20 Jenis alat peraga pelatihan keperawatan (manekin anatomi)	
				Pengadaan 12 Unit kendaraan operasional Roda 2 Pelayanan Si-Taro	
			Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Videotron 1 Paket, PC Branded 10 Unit, Printer Deskjet 20 Unit, Scanner 5 Unit, Laptop 3 Unit, Server 2 Unit, Flat Panel 1 Unit, Aplikasi Zoom Meeting 12 Bulan	2,206,754,900
3	Dinas Kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	Pengembangan Puskesmas	Pengembangan/Rehab Total Puskesmas Jati Rahayu	400,000,000

NO	PERANGKAT DAERAH	USULAN		TARGET	PAGU (RP.)
		KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
		Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	DED Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Rehab Dan Perluasan Instalasi Farmasi)	75,000,000
			Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Pemagaran dan Penataan Halaman UPTD Labkesda)	400,000,000
			Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit di 4 UPTD Puskesmas Harapan Mulya, Medan Satria, Jati Mekar, Jati Kramat dan RSUD Kelas D Teluk Pucung	4,000,000,000
				UPTD Instalasi Farmasi : Belanja Mobil box dengan pendingin untuk angkut Obat dan Vaksin pada Instalasi Farmasi (1 unit) Spesifikasi Mobil Isuzu traga, Pendingin full nipon denso (original) / cool drayer ND-20	385,700,000
				Pengadaan Alat Pengaman Kantor / CCTV	100,000,000

NO	PERANGKAT DAERAH	USULAN		TARGET	PAGU (RP.)
		KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
				Pemeliharaan gedung A&Gedung B, Penyelamatan ruangan LT 3 ruangan ICU, pemeliharaan jaringan listrik dan Genset dan pemeliharaan peralatan/perengkapan kantor RSUD Kelas D Jati Sampurna	743,000,000
			Pengembangan Rumah Sakit	Pengembangan RSUD Tipe D Pondokgede	4,345,000,000
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengadaan Buku KIA	100,000,000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pengadaan Lansia KIT	215,000,000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pengadaan BHP Program TBC	250,000,000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pengadaan BHP skrining HIV dan Sifilis pada ibu hamil	400,000,000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pemeriksaan Viral Load (VL) Bagi ODHA di Kota Bekasi	400,000,000
				Pemberian Makanan Tambahan Lokal untuk Balita Kurus di Lokus Stunting	308,160,000
				Pemberian Makanan Pemulihan untuk Balita Gizi Buruk	100,000,000

NO	PERANGKAT DAERAH	USULAN			PAGU (Rp.)
		KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET	
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	425,000,000
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Dokumen Study Kelayakan Puskesmas	100,000,000
4	SETDA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan motor ambulance, mobil operasional, mobil jenazah	98,000,000
TOTAL					31,565,257,808
JUMLAH SUB KEGIATAN					22
TOTAL PAGU					58,641,867,000
TOTAL SUB KEGIATAN DID 2021					33

PENGUNAAN SILPA DANA INSENTIF DAERAH TAHUN 2019

NO	PERANGKAT DAERAH	USULAN		TARGET	PAGU (RP.)
		KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
1	BPKAD	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan penyusunan Regulasi serta kebijakan Bidang Anggaran	Penyusunan ASB dan aplikasinya	200,000,000
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		
2	BAPENDA	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Pembuatan Sistem Akuntansi Terintegrasi	200,000,000
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		
			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	350,000,000

NO	PERANGKAT DAERAH	USULAN		TARGET	PAGU (RP.)
		KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
3	BAPPELITBANGDA	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Rapat Pembahasan 2. Pengembangan Aplikasi Penunjang SIPD 3. Pelatihan Penggunaan Aplikasi 	200,000,000
4	Inspektorat Kota Bekasi	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Pengelolaan Data Kelitbitangan dan Peraturan	1 Aplikasi Data Kelitbitangan	150,000,000
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Pengembangan e-monev	100,000,000
5	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Dibutuhkan dalam rangka penguatan pengawasan Internal	2,388,810,514
			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Peningkatan kapabilitas APPP melalui sertifikasi, pelatihan dan diklat	
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Sertifikasi Keamanan Pangan	150,000,000
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			150,000,000

NO	PERANGKAT DAERAH	USULAN		TARGET	PAGU (RP.)
		KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Pemeliharaan Gedung BCCP	200,000,000
8	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	10 Jenis alat bantu yang dibutuhkan penyandang disabilitas seperti kaki palsu, alat bantu dengar, kursi roda, dll	150,000,000
9	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Pembangunan USB SD Bojong Rawalumbu 5 Kota Bekasi	2,200,000,000
TOTAL SUB KEGIATAN SILPA DID 2019					6,988,810,514
JUMLAH SUB KEGIATAN					13

WALI KOTA BEKASI,



RAHMAT EFFENDI